



**IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
INSPEKTORAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
SEMESTER II TAHUN 2024**

TAHUN 2025

**DAFTAR ISI**

| | |
|---|----|
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| RINGKASAN UNTUK PIMPINAN..... | 3 |
| BAB I INFORMASI UMUM | 6 |
| A. Dasar Hukum | 6 |
| B. Struktur Organisasi | 7 |
| C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan | 9 |
| D. Program Pengawasan dan Realisasinya | 9 |
| BAB II HASIL PENGAWASAN..... | 13 |
| A. Audit | 14 |
| 1. Audit Kinerja dan Audit Operasional | 14 |
| 2. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) | 18 |
| 3. Analisis Hasil Audit..... | 22 |
| B. Reviu | 22 |
| C. Monitoring atau Pemantauan | 22 |
| D. Evaluasi..... | 23 |
| E. Kegiatan Pengawasan Lainnya | 23 |
| BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT | 25 |
| A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI | 25 |
| B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP | 25 |
| C. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Lainnya | 26 |
| BAB IV HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT | 27 |
| BAB V SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI | 28 |
| A. Simpulan | 28 |
| B. Hambatan | 28 |
| C. Rekomendasi..... | 29 |



RINGKASAN UNTUK PIMPINAN

Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta dalam periode semester II tahun 2024 telah melaksanakan pengawasan yang didasarkan pada kode etik pengawasan dan Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia serta prosedur lain yang sesuai melalui penilaian atas sistem pengendalian internal yang diterapkan, pengumpulan dan penelaahan bukti-bukti dan penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun hasil kegiatan pengawasan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta periode semester II tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur Daerah Kota Yogyakarta telah menerbitkan 55 surat perintah tugas regular yang terbagi dalam pemeriksaan operasional pada 4 PD, pemeriksaan kinerja pada 4 PD dan audit dengan tujuan tertentu pada 6 PD serta mandatori lainnya, dimana pada semester II tahun 2024 telah terbit 107 LHP. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada periode semester II tahun 2024 telah dilakukan sebanyak 6 penugasan dan telah diterbitkan 3 LHP;
- b. Dari hasil pemeriksaan operasional didapatkan 27 temuan dan 62 rekomendasi dengan kerugian daerah senilai Rp 3.868.356,-. Telah tertindaklanjuti sebanyak 62 rekomendasi (100%) dan disetorkan kembali ke kas daerah dengan nilai Rp 3.868.356,- ;
- c. Dari hasil pemeriksaan kinerja terdapat 10 temuan dan 20 rekomendasi dengan kerugian daerah senilai Rp 35.217.882,-. Telah tertindaklanjuti sebanyak 20 rekomendasi (100%) dan disetorkan kembali ke kas daerah dengan nilai Rp 35.217.882,-. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan auditi dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka peningkatan tata kelola 3E serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
- d. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI periode Semester 1 Tahun 2024 yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah tanggal 5 Desember 2024 bertempat di kantor BPK Perwakilan DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dengan status sesuai sejumlah 1.057 dari 1.071 rekomendasi atau **98,69%**. Sedangkan pemeriksaan Itjen Kemendagri sampai dengan semester II Tahun 2024 belum menerbitkan Laporan Hasil Pengawasan untuk Kota Yogyakarta. Serta pengawasan Inspektorat DIY terhadap Inspektorat Kota Yogyakarta terdapat Catatan Hasil Reviu yang telah disampaikan dan sudah selesai ditindaklanjuti. Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta juga telah



melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya seperti sosialisasi, pelatihan dikantor sendiri, telaah sejawat internal dan eksternal dan yang lain;

RANGKUMAN HASIL PENGAWASAN

a. Permasalahan

Dari hasil audit yang telah dilaksanakan, berikut beberapa permasalahan yang muncul :

- 1) Transaksi non tunai belum dipahami sesuai ketentuan;
- 2) Lemahnya sistem pengukuran realisasi kinerja;
- 3) Lemahnya evaluasi terhadap sistem penerimaan PAD;
- 4) Lemahnya pemahaman Bendahara Pengeluaran terhadap ketentuan perpajakan;
- 5) Masih adanya ketentuan SHSJ yang perlu dijelaskan lebih lanjut;
- 6) Pengendalian PPTK terhadap belanja lemah.

b. Rekomendasi Strategis

Untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul, kami memberikan rekomendasi pada tiga aspek sebagai berikut :

1) Tata kelola

Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar menerapkan ketentuan tata kelola yang baik pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

2) Manajemen Risiko

Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar :

- a. menyusun penilaian risiko *fraud*/kecurangan pada pelaksanaan kegiatan maupun pengelolaan keuangan dan barang, serta menyusun pengendaliannya;
- b. memantau pengendalian atas risiko kecurangan yang sudah diidentifikasi dan melaporkannya.

3) Pengendalian

1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar :

- a. memastikan penerapan sisdur keuangan, aset dan SHJ sesuai peraturan yang berlaku;
- b. meningkatkan pengendalian terkait kode etik dan memberikan keteladanan dalam integritas.



2. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan agar melaksanakan reviu dan memperbaiki pengaturan terhadap pengelolaan keuangan dan aset yang dapat menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.

Yogyakarta, 11 Maret 2025



[Handwritten Signature]

LILY RABALA LINA ANDRIANI, ST
NIP. 19700327 199503 2 002



BAB I

INFORMASI UMUM

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah;
16. Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 484 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahun 2024;
17. Keputusan Inspektur Kota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Inspektur Kota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2024.

B. Struktur Organisasi

Dasar :

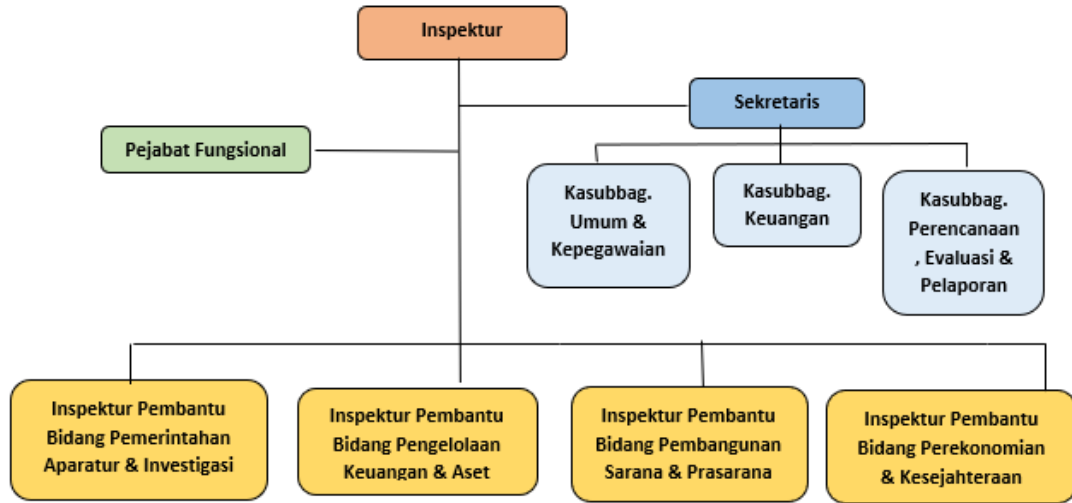
1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
2. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah.

Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Inspektur : Fitri Paulina Andriani, S.T.
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sekretaris : Tugiyarta, S.IP., MSI.
 - 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Sri Suhartini, A.Md.
 - 2.2. Sub Bagian Keuangan : Yohanes Yosef Wea, S.T.
 - 2.3. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan : Raras Ayu Puspitasari, S.E., M.Sc.
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi : Hastanti, S.E.
4. Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset : Anna Krismanawati, S.E.



5. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana : Yohanna Purnomo Sari, S.T., M.Eng.
6. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat : Esti Rahayu Apriyanti, S.E.
7. Kelompok Jabatan Fungsional : Auditor & P2UPD



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta

Sumber : LAKIP 2024 Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta

Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah sampai dengan Semester II Tahun 2024 adalah sebanyak 76 orang yang terdiri dari pegawai laki-laki sebanyak 23 orang dan pegawai perempuan sebanyak 53 orang. Dari jumlah tersebut memiliki tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 1
Jenjang Pendidikan Pegawai
Inspektorat Daerah
Tahun 2024

| No | JENJANG PENDIDIKAN | JUMLAH PERSONIL |
|----|--------------------|-----------------|
| 1 | S2 | 6 |
| 2 | S1 | 42 |
| 3 | D3 | 24 |
| 4 | SMA/SMK | 4 |
| 5 | SLTP | 0 |
| 6 | SD | 0 |
| | TOTAL | 76 |

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, selain dilaksanakan oleh PNS, Inspektorat Daerah juga dibantu oleh 3 personil Non ASN dengan komposisi 1 orang Naban (Tenaga bantu) dan 2 orang Tenaga Teknis untuk melaksanakan ketugasan di Sekretariat sebagaimana tercantum pada tabel 2.



Tabel 2
Jumlah Naban dan Tenaga Teknis
Tahun 2024

| STATUS PEGAWAI | JUMLAH | PENEMPATAN |
|---|---------|--|
| Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan (JLOP) | 1 orang | Subbag Umum & Kepegawaian |
| | 2 orang | 1 orang pada Subbag Umum & Kepegawaian dan 1 orang pada Subbag Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan |

C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan

Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta adalah untuk bahan pelaksanaan evaluasi nasional tentang hasil pengawasan intern dengan tersedianya informasi hasil pengawasan APIP sebagai dasar untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi.

D. Program Pengawasan dan Realisasinya

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta melaksanakan mandat yang diberikan oleh Pj Wali Kota Yogyakarta, program kerja pengawasan dan realisasi yang sudah dilaksanakan dalam Semester II Tahun 2024 yaitu :

Tabel 3
Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya
Berdasarkan PKPT dan Non PKPT
Semester II Tahun 2024

| No | Kegiatan Pengawasan | PKPT | | Non PKPT | Keterangan |
|----------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | Target Pengawasan | Realisasi Pengawasan | Realisasi Pengawasan | |
| | | Jumlah OP | Jumlah OP | Jumlah OP | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| A | Audit | | | | |
| | 1. Audit Kinerja | 4 | 4 | | |
| | 2. Audit Operasional | 4 | 4 | | |
| | 3. ADTT/PDPT | 6 | 11 | | Terdiri dari ADTT Tematik, Probitiy, Investigasi dan PDPT. |
| B | Reviu | | | | |
| | a. Reviu DAK Fisik | 7 | 2 | | |
| | b. Reviu Penyerapan Anggaran (PA) | 2 | 2 | | |
| | c. Reviu DAU Penggajian PPPK | 6 | 6 | | |
| | d. Reviu DAU Pendanaan Kelurahan | 2 | 2 | | |



| No | Kegiatan Pengawasan | PKPT | | Non PKPT | Keterangan |
|----------|---|-------------------|----------------------|----------------------|------------|
| | | Target Pengawasan | Realisasi Pengawasan | Realisasi Pengawasan | |
| | | Jumlah OP | Jumlah OP | Jumlah OP | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| | e. Reviu DAU Bidang Kesehatan | 1 | 2 | | |
| | f. Reviu KUPA/PPAS P 2024 | 1 | 0 | | |
| | g. Reviu Penyerapan DAU | 3 | 1 | | |
| | h. Reviu Manajemen ASN | 1 | 1 | | |
| | i. Reviu KUA 2024 | 1 | 1 | | |
| | j. Reviu Tata Kelola BMD | 1 | 1 | | |
| | k. Reviu SSH dan ASB | 1 | 2 | | |
| | l. Reviu RKPD Perubahan 2024 | 1 | 1 | | |
| | m. Reviu Capaian Penggunaan DAU Bidang Pekerjaan Umum | 2 | 3 | | |
| | n. Reviu Capaian Penggunaan DAK | 2 | 1 | | |
| | o. Reviu Implementasi <i>E-purchasing</i> | 1 | 0 | | |
| | p. Reviu Serapan PBJ | 2 | 2 | | |
| | q. Reviu Bantuan Sosial (Bansos)/Hibah | 1 | 0 | | |
| | r. Reviu Renja Perubahan 2024 | 1 | 1 | | |
| | s. Reviu Renja 2025 | 1 | 1 | | |
| | t. Reviu RKA Perubahan | 1 | 1 | | |
| | u. Reviu RKA | 1 | 1 | | |
| | v. Reviu P3DN | 1 | 1 | | |
| | w. Reviu KUPA/PPAS 2025 | | | 1 | |
| C | Monitoring | | | | |
| | a. Monitoring Pengendalian Gratifikasi | 1 | 1 | | |
| | b. Monitoring P3DN Semester 1 Tahun 2024 | 1 | 1 | | |
| | c. Monitoring WBS | 2 | 2 | | |
| | d. Monitoring MCP KPK | 1 | 1 | | |
| | e. Monitoring Tindak Lanjut AKIP | 1 | 1 | | |
| | f. Monitoring Pengadaan | 1 | 1 | | |



| No | Kegiatan Pengawasan | PKPT | | Non PKPT | Keterangan |
|----------|--|-------------------|----------------------|----------------------|---|
| | | Target Pengawasan | Realisasi Pengawasan | Realisasi Pengawasan | |
| | | Jumlah OP | Jumlah OP | Jumlah OP | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| | Barang/Jasa (PBJ) | | | | |
| | g. Monitoring TLHP Eksternal dan Internal | 1 | 4 | | Kegiatan Pemantauan dilaksanakan oleh ke empat bidang, menghasilkan 4 laporan |
| | h. Monitoring <i>Stock Opname</i> | 1 | 1 | | |
| | i. Monitoring Penanganan Benturan Kepentingan | | | 1 | |
| D | Evaluasi | | | | |
| | a. Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi General | 2 | 1 | | |
| | b. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Pengendalian Inflasi dan Peningkatan Investasi | 2 | 0 | | |
| | c. Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan | 2 | 2 | | |
| | d. Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan P3DN dan Pengentasan Kemiskinan | 2 | 1 | | |
| | e. Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP | 1 | 3 | | |
| E | Kegiatan Pengawasan Lainnya | | | | |
| | a. Penelitian dan Penelaahan Informasi | 6 | 18 | | |
| | b. Layanan Klinik Konsultasi | 6 | 4 | | |
| | c. FGD Pengelolaan dan Penatausahaan OPAD | 1 | 1 | | |
| | d. Saber Pungli | 6 | 6 | | |



| No | Kegiatan Pengawasan | PKPT | | Non PKPT | Keterangan |
|----------|---|-------------------|----------------------|----------------------|------------|
| | | Target Pengawasan | Realisasi Pengawasan | Realisasi Pengawasan | |
| | | Jumlah OP | Jumlah OP | Jumlah OP | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| | e. Pemantauan Seleksi CASN | 1 | 1 | | |
| | f. Peer Reviu Internal | 1 | 4 | | |
| | g. Peer Reviu Eksternal | 1 | 1 | | |
| | h. Pemantauan atas Pekerjaan Pembangunan SAH Giwangan RW 13 | | | 1 | |
| | Jumlah | 94 | 105 | 3 | |

Keterangan: Realisasi audit diisi berdasarkan jumlah laporan hasil audit yang diterbitkan



BAB II

HASIL PENGAWASAN

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta selama Semester II Tahun 2024 berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yaitu :

A. Audit

1. Audit Kinerja
2. Audit Operasional
3. Audit Dengan Tujuan Tertentu

B. Reviu

1. Reviu DAK Fisik
2. Reviu Penyerapan Anggaran (PA)
3. Reviu DAU Penggajian PPPK
4. Reviu DAU Pendanaan Kelurahan
5. Reviu DAU Bidang Kesehatan
6. Reviu KUPA/PPAS P 2024
7. Reviu Penyerapan DAU
8. Reviu Manajemen ASN
9. Reviu KUA 2024
10. Reviu Tata Kelola BMD
11. Reviu SSH dan ASB
12. Reviu RKPD Perubahan 2024
13. Reviu Capaian Penggunaan DAK Bidang Pekerjaan Umum
14. Reviu Capaian Penggunaan DAK
15. Reviu Implementasi E-purchasing
16. Reviu Serapan PBJ
17. Reviu Bantuan Sosial (Bansos)/Hibah
18. Reviu Renja Perubahan 2024
19. Reviu Renja 2025
20. Reviu RKA Perubahan
21. Reviu RKA
22. Reviu P3DN

C. Monitoring/Pemantauan

1. Monitoring Pengendalian Gratifikasi
2. Monitoring P3DN Semester 1 Tahun 2024
3. Monitoring WBS
4. Monitoring MCP KPK
5. Monitoring Tindak Lanjut AKIP
6. Monitoring Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
7. Monitoring TLHP Eksternal dan Internal
8. Monitoring Stock Opname

D. Evaluasi

1. Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi General
2. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Pengendalian Inflasi dan Peningkatan Investasi



3. Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan
4. Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan P3DN dan Pengentasan Kemiskinan
5. Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP

E. Pengawasan Lainnya

1. Penelitian dan Penelaahan Informasi
2. Layanan Klinik Konsultasi
3. FGD Pengelolaan dan Penatausahaan OPAD
4. Saber Pungli
5. Pemantauan Seleksi CASN
6. Peer Reviu Internal
7. Peer Reviu Eksternal
8. Pendampingan OPD Mitra

Kelima kelompok kegiatan pengawasan tersebut dirinci sebagai berikut :

A. Audit

1. Audit Kinerja dan Audit Operasional

Kegiatan audit kinerja/operasional dilakukan berdasarkan kode etik dan standar audit serta analisa hasil pengawasan terhadap atribut-atribut temuan hasil audit kinerja/operasional yang meliputi kondisi temuan dan rekomendasi.

- a) Jumlah kejadian per masing-masing sub kelompok temuan disajikan sesuai Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4
Temuan Hasil Audit Kinerja
Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta
Semester II Tahun 2024

| No | Sub Kelompok Temuan*) | Kode | Jumlah Kejadian | % | Nilai (Rp) |
|----|---|---------|-----------------|-----------|-------------------|
| | Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan | 1.00.00 | | | |
| 1 | Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah | 1.01.00 | 1 | 10 | 1.274.882 |
| 2 | Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah | 1.02.00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah | 1.03.00 | 2 | 20 | 870.000 |
| 4 | Administrasi | 1.04.00 | 3 | 30 | 30.823.000 |
| 5 | Indikasi tindak pidana | 1.05.00 | 0 | 0 | 0 |
| | Subtotal Kejadian | | 6 | 60 | 32.967.882 |
| | Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | 2.00.00 | | | |
| 1 | Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan | 2.01.00 | 0 | 0 | 0 |



| No | Sub Kelompok Temuan*) | Kode | Jumlah Kejadian | % | Nilai (Rp) |
|----|---|---------|-----------------|------------|-------------------|
| | Pelaporan | | | | |
| 2 | Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja | 2.02.00 | 1 | 10 | 0 |
| 3 | Kelemahan struktur pengendalian intern | 2.03.00 | 2 | 20 | 0 |
| | Subtotal Kejadian | | 3 | 30 | 0 |
| | Temuan 3 E | 3.00.00 | | | |
| 1 | Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan | 3.01.00 | 1 | 10 | 2.250.000 |
| 2 | Ketidakefisienan | 3.02.00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ketidakefektifan | 3.03.00 | 0 | 0 | 0 |
| | Subtotal Kejadian | | 1 | 10 | 2.250.000 |
| | Jumlah Kejadian | | 10 | 100 | 35.217.882 |

Tabel 5
Temuan Hasil Audit Operasional
Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta
Semester II Tahun 2024

| No | Sub Kelompok Temuan*) | Kode | Jumlah Kejadian | % | Nilai (Rp) |
|----|---|---------|-----------------|-----------|------------------|
| | Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan | 1.00.00 | | | |
| 1 | Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah | 1.01.00 | 4 | 15 | 282.000 |
| | | | | | 3.457.356 |
| 2 | Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah | 1.02.00 | 0 | - | - |
| 3 | Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah | 1.03.00 | 0 | - | - |
| 4 | Administrasi | 1.04.00 | 15 | 56 | - |
| 5 | Indikasi tindak pidana | 1.05.00 | 0 | - | - |
| | Subtotal Kejadian | | 19 | 71 | 3.739.356 |
| | Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | 2.00.00 | | | |
| 1 | Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan Pelaporan | 2.01.00 | 1 | 4 | - |
| 2 | Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja | 2.02.00 | 3 | 11 | - |
| 3 | Kelemahan struktur pengendalian intern | 2.03.00 | 2 | 7 | - |
| | Subtotal Kejadian | | 6 | 22 | 0 |
| | Temuan 3 E | 3.00.00 | | | |
| 1 | Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan | 3.01.00 | 0 | - | - |
| 2 | Ketidakefisienan | 3.02.00 | 0 | - | - |
| 3 | Ketidakefektifan | 3.03.00 | 2 | 7 | - |
| | Subtotal Kejadian | | 2 | 7 | 0 |



| No | Sub Kelompok Temuan*) | Kode | Jumlah Kejadian | % | Nilai (Rp) |
|----|------------------------|------|-----------------|------------|------------------|
| | Jumlah Kejadian | | 27 | 100 | 3.739.356 |

b) Jumlah kejadian per masing-masing sub kelompok rekomendasi disajikan sesuai Tabel 6 dan Tabel 7.

Tabel 6
Rekomendasi Temuan Hasil Audit Kinerja
Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta
Semester II Tahun 2024

| No | Sub Kelompok Rekomendasi | Kode | Jumlah Kejadian | % | Nilai Temuan (Rp) |
|----|--|------|-----------------|----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan masyarakat | 01 | 4 | 20 | 30.823.000 1.274.882 2.250.000 870.000 |
| 2 | Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan masyarakat | 02 | 0 | 0 | - |
| 3 | Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan | 03 | 0 | 0 | - |
| 4 | Penghapusan barang milik negara/daerah | 04 | 0 | 0 | - |
| 5 | Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian | 05 | 1 | 5 | - |
| 6 | Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi | 06 | 7 | 35 | - |
| 7 | Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan | 07 | 1 | 5 | - |
| 8 | Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian | 08 | 2 | 10 | - |
| 9 | Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan | 09 | 4 | 20 | - |
| 10 | Perubahan atau perbaikan struktur organisasi | 10 | 0 | 0 | - |
| 11 | Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang | 11 | 0 | 0 | - |
| 12 | Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern | 12 | 0 | 0 | - |
| 13 | Pelaksanaan sosialisasi | 13 | 1 | 5 | - |



| No | Sub Kelompok Rekomendasi | Kode | Jumlah Kejadian | % | Nilai Temuan (Rp) |
|----|--------------------------|------|-----------------|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | Lain-lain | 14 | 0 | 0 | - |
| | Jumlah | | 20 | 100 | 35.217.882 |

Tabel 7
Rekomendasi Temuan Hasil Audit Operasional
Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta
Semester II Tahun 2024

| No | Sub Kelompok Rekomendasi | Kode | Jumlah Kejadian | % | Nilai Temuan (Rp) |
|----|--|------|-----------------|------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan masyarakat | 01 | 2 | 4 | 282.000 3.457.356 |
| 2 | Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan masyarakat | 02 | 0 | 0 | - |
| 3 | Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan | 03 | 0 | 0 | - |
| 4 | Penghapusan barang milik negara/daerah | 04 | 0 | 0 | - |
| 5 | Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian | 05 | 5 | 10 | - |
| 6 | Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi | 06 | 15 | 30 | - |
| 7 | Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan | 07 | 1 | 2 | - |
| 8 | Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian | 08 | 2 | 4 | - |
| 9 | Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan | 09 | 14 | 28 | - |
| 10 | Perubahan atau perbaikan struktur organisasi | 10 | 0 | 0 | - |
| 11 | Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang | 11 | 2 | 4 | - |
| 12 | Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern | 12 | 0 | 0 | - |
| 13 | Pelaksanaan sosialisasi | 13 | 2 | 4 | - |
| 14 | Lain-lain | 14 | 7 | 14 | - |
| | Jumlah | | 50 | 100 | 3.739.356 |



2. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

Audit dengan tujuan tertentu dilakukan berdasarkan kode etik, standar audit dan dirinci sesuai jenis auditnya. Selama Semester II Tahun 2024 ADTT yang dilaksanakan yaitu bersifat tematik 2 (dua) audit berupa audit Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah dan audit Pengelolaan Hibah Pemerintah Kota Yogyakarta, *probity* 6 (enam) audit berupa audit *Probity* Pekerjaan Pembangunan SMPN 10 Yogyakarta pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024; *Probity* Audit Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) Tahun Anggaran 2024; *Probity* Audit Tahap Pelaksanaan Modal Belanja Modal Konstruksi TP3SR Karangmiri TA 2024 Pemerintah Kota Yogyakarta; *Probity* Audit Pekerjaan Perluasan Gedung Fasilitas dan Pengadaan Perabot Layanan Perpustakaan Kota Yogyakarta; Pekerjaan Pembangunan Gedung Taman Budaya Embung Giwangan Tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 dan *Probity* Audit Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Pakualaman pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024, serta terdapat 3 (satu) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) berupa Evaluasi Perumda BPR Bank Jogja; Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dan Reviu atas Proses Reviu Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Perluasan Gedung Fasilitas dan Pengadaan Perabot Layanan Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta.

Tabel 8
Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu Berdasarkan Jenis Audit
Semester II Tahun 2024

| No | Kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu | PKPT | | Non PKPT |
|----------|---|--------------|-----------------|-----------------|
| | | Target Audit | Realisasi Audit | Realisasi Audit |
| | | Jumlah OP | Jumlah OP | Jumlah OP |
| A | Tematik | | | |
| 1. | Audit atas hal-hal lain di bidang keuangan dan aset | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Audit atas hal-hal lain di bidang pemerintahan dan aparatur | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Audit Pengadaan Barang dan Jasa | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Audit atas hal-hal lain di bidang sarana dan prasarana | 4 | 3 | 0 |
| 5. | Audit atas hal-hal lain di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat | 0 | 0 | 1 |
| B | Probity | 2 | 2 | 5 |
| C | Khusus/Investigasi | 0 | 0 | 5 |

Keterangan:

Realisasi audit diisi berdasarkan jumlah laporan hasil audit yang diterbitkan.

Untuk audit investigatif dapat dilaporkan hal-hal sebagaimana dinyatakan dalam tabel 9.



Tabel 9
Jumlah Objek Audit Investigatif
Semester II Tahun 2024

| Keterangan | Jumlah |
|---|--------|
| Jumlah objek audit investigatif | 1 |
| Jumlah audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) | 0 |
| % audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) | 0 |

Hasil audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang dilimpahkan ke Instansi Penyidik dilaporkan sebagaimana tabel 10.

Tabel 10
Audit Investigatif yang Dilimpahkan ke Instansi Penyidik
Semester II Tahun 2024

| Instansi Penyidik | Kasus | % | Potensi Kerugian Negara*) | |
|-------------------|--------------|---|---------------------------|----------|
| | | | Rupiah | Valas**) |
| Kepolisian | NIHIL | | | |
| Kejaksaan | | | | |
| KPK | | | | |
| Jumlah | | | | |

*) yang dimaksud dengan potensi kerugian negara adalah nilai kerugian negara yang mungkin akan ditimbulkan.

**) diawali dengan simbol mata uang valuta asing (valas)

Tindak lanjut kasus oleh instansi penyidik atas kasus yang dilimpahkan ke instansi penyidik dapat dilaporkan sebagaimana Tabel 11.

Tabel 11
Tindak Lanjut Oleh Instansi Penyidik
Semster II Tahun 2024

| Status | Kasus | % | Potensi Kerugian Negara*) | | Keterangan |
|---------------------------|--------------|---|---------------------------|----------|------------|
| | | | Rupiah | Valas**) | |
| Penyelidikan | NIHIL | | | | |
| Penyidikan | | | | | |
| Dihentikan | | | | | |
| Dilimpahkan ke pengadilan | | | | | |
| Penuntutan | | | | | |
| Diputus*) | | | | | |
| Jumlah | | | | | |

*) jika sudah diputuskan oleh pengadilan maka potensi kerugian diisi dengan nilai putusan final pengadilan

**) diawali dengan simbol mata uang valuta asing (valas)



Tabel 12
Temuan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu
Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta
Semster II Tahun 2024

| No | Sub Kelompok Temuan*) | Kode | Jumlah Kejadian | Nilai (Rp) |
|----|---|---------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan | 1.00.00 | | |
| 1 | Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah | 1.01.00 | - | - |
| 2 | Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah | 1.02.00 | - | - |
| 3 | Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah | 1.03.00 | - | - |
| 4 | Administrasi | 1.04.00 | - | - |
| 5 | Indikasi tindak pidana | 1.05.00 | - | - |
| | Subtotal Kejadian | | 0 | 0 |
| | Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | 2.00.00 | | |
| 1 | Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan | 2.01.00 | - | - |
| 2 | Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja | 2.02.00 | - | - |
| 3 | Kelemahan struktur pengendalian intern | 2.03.00 | 27 | - |
| | Subtotal Kejadian | | 27 | 0 |
| | Temuan 3 E | 3.00.00 | | |
| 1 | Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan | 3.01.00 | - | - |
| 2 | Ketidakefisienan | 3.02.00 | - | - |
| 3 | Ketidakefektifan | 3.03.00 | - | - |
| | Subtotal Kejadian | | 0 | 0 |
| | Jumlah Kejadian | | 27 | 0 |

Tabel 13
Rekomendasi Temuan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu
Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta
Semester II Tahun 2024

| No | Sub Kelompok Rekomendasi | Kode | Jumlah Kejadian | Nilai Temuan (Rp) |
|----|---|------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan masyarakat | 01 | 0 | - |
| 2 | Pengembalian barang kepada | 02 | 0 | - |



| No | Sub Kelompok Rekomendasi | Kode | Jumlah Kejadian | Nilai Temuan (Rp) |
|----|--|------|-----------------|-------------------|
| | negara, daerah, BUMN/D, dan masyarakat | | | |
| 3 | Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan | 03 | 0 | - |
| 4 | Penghapusan barang milik negara/daerah | 04 | 0 | - |
| 5 | Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian | 05 | 0 | - |
| 6 | Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi | 06 | 13 | - |
| 7 | Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan | 07 | 1 | - |
| 8 | Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian | 08 | 0 | - |
| 9 | Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan | 09 | 11 | - |
| 10 | Perubahan atau perbaikan struktur organisasi | 10 | 0 | - |
| 11 | Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang | 11 | 0 | - |
| 12 | Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern | 12 | 0 | - |
| 13 | Pelaksanaan sosialisasi | 13 | 2 | - |
| 14 | Lain-lain | 14 | 0 | - |
| | Jumlah | | 27 | 0 |

Tabel 14
Kode Etik dan Standar Audit yang digunakan

| Kode etik dan standar audit | Dasar peraturan perundang-undangan |
|-----------------------------|--|
| Kode Etik APIP | Permen PANRM Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Instansi Pemerintah |



| | |
|--|---|
| Standar Audit APIP | Permen PANRB Nomor PER/05/M.PAN/3/2008 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah |
| Kode Etik dan Aturan Perilaku Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta | Keputusan Inspektur Nomor 37 Tahun 2009 tentang Kode Etik dan Aturan Perilaku Inspektorat Kota Yogyakarta |
| Piagam Audit Internal | Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 408 Tahun 2024 tentang Piagam Audit Intern |

3. Analisis Hasil Audit

Berdasarkan dari hasil audit kinerja, audit operasional dan audit dengan tujuan tertentu dapat disimpulkan Perangkat Daerah masih banyak yang belum menerapkan tata kelola yang baik dan juga belum menerapkan standar operasi prosedur keuangan yang berlaku sesuai ketentuan. Masih lemahnya struktur pengendalian intern pada Perangkat Daerah.

B. Reviu

Selama Semester 2 Tahun 2024 telah dilakukan reviu atas Reviu DAK Fisik; Reviu Penyerapan Anggaran (PA); Reviu DAU Penggajian PPPK; Reviu DAU Pendanaan Kelurahan; Reviu DAU Bidang Kesehatan; Reviu Penyerapan DAU Reviu Manajemen ASN; Reviu KUA 2024; Reviu Tata Kelola BMD; Reviu SSH dan ASB; Reviu RKPD Perubahan 2024; Reviu Capaian Penggunaan DAK Bidang Pekerjaan Umum; Reviu Capaian Penggunaan DAK; Reviu Serapan PBJ; Reviu Renja Perubahan 2024; Reviu Renja 2025; Reviu RKA Perubahan; Reviu RKA; Reviu P3DN dan Reviu KUPA/PPAS 2025. Data yang disampaikan adalah jumlah objek reviu dan jumlah pernyataan reviu untuk masing-masing objek sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 15. Jumlah objek yang direviu merupakan jumlah seluruh entitas akuntansi yang ada di institusi yang menjadi kewajiban APIP.

Tabel 15
Jumlah Objek Reviu
Semester II Tahun 2024

| Keterangan | Jumlah |
|--------------------------------------|--------|
| Jumlah objek yang seharusnya direviu | 40 |
| Jumlah objek yang direviu | 33 |

C. Monitoring atau Pemantauan

Kegiatan monitoring atau pemantauan yang dilaksanakan pada Semester II Tahun 2024 yaitu Monitoring Pengendalian Gratifikasi; Monitoring P3DN Semester 1 Tahun 2024; Monitoring WBS; Monitoring MCP KPK; Monitoring Tindak Lanjut AKIP; Monitoring Pengadaan Barang/Jasa (PBJ); Monitoring TLHP Eksternal dan Internal; Monitoring *Stock Opname*; Pemantauan Seleksi CASN dan Pemantauan atas Pekerjaan Pembangunan SAH Giwangan RW 13.

Monitoring MCP KPK untuk bukti dukung belum memenuhi kriteria sesuai pedoman, yang sudah dilakukan adalah koordinasi secara berkala pada masing-masing area intervensi baik pada level Inspektorat maupun Sekretaris Daerah.



Terkait pelaksanaan P3DN masih terdapat penyampaian laporan realisasi dari Perangkat Daerah yang terlambat. Upaya yang sudah dilakukan dengan melaksanakan monitoring P3DN setiap semester.

D. Evaluasi

Kegiatan evaluasi yang dilakukan di Semester 2 Tahun 2024 yaitu Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi General; Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan; Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan P3DN dan Pengentasan Kemiskinan; Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP; Evaluasi Manajemen Risiko Strategis Pemerintah Kota.

Secara umum hasil evaluasi SPIP tahun 2024 masih menemukan kendala aplikasi masih belum stabil sehingga masih menggunakan kertas kerja manual, untuk pengumpulan bukti dukung dari Perangkat Daerah belum optimal, panduan bukti dukung perlu diperbaharui.

Hasil evaluasi MR Strategis Pemerintah Kota Yogyakarta masih memerlukan perbaikan penilaian risiko sasaran strategis Pemerintah Kota Yogyakarta dan penyusunan pengendalian yang dibutuhkan dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait.

E. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Pada Semester II Tahun 2024 terdapat beberapa kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, FGD, pendampingan dan konsultasi.

1. Sosialisasi yang dilaksanakan berupa Sosialisasi Saber Pungli 2024;
2. Dilaksanakan *Focus Group Discussion* Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan *Focus Group Discussion* Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Layanan Konsultasi dilakukan melalui Klinik Konsultasi baik online maupun offline.

Tabel 16
Jumlah Konsultasi berdasar Tema yang diminta Klient

| No | Tema Konsultasi | Jumlah | Keterangan |
|---------------------|----------------------|----------|------------------------------------|
| 1 | Manajemen Risiko | 0 | |
| 2 | Pengelolaan Keuangan | 2 | Keuangan Lainnya (Pengurus Barang) |
| 3 | SPIP | 2 | |
| 4 | Kepegawaian | 0 | |
| 5 | Hukuman Disiplin | 0 | |
| 6 | Lain-lain | 1 | P3DN |
| Total Jumlah | | 5 | |

Selain kegiatan diatas, juga dilaksanakan penilaian Maturitas SPIP pada level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Nilai Maturitas SPIP pada level Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta sebesar **3,319**. Pada Maturitas SPIP level Perangkat Daerah secara umum sudah berada di rata-rata **level 3** atau **terdefinisi**.



Tabel 17
Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Penilaian SPIP
Tahun 2024

| Nilai SPIP | Jumlah PD |
|--------------|-----------|
| 3,001 - 3,50 | 1 |
| 3,51 - 4,00 | 0 |
| 4,001 – 5,00 | 41 |

F. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan Kapasitas SDM dilakukan dengan pengiriman peserta diklat, penyelenggaraan diklat dan pelatihan di kantor sendiri.

Tabel 18
Laporan Hasil Peningkatan Kapasitas SDM
Semester II Tahun 2024

| No | Kegiatan | Belanja (Rp) | | Keluaran | | | Ket. |
|----|----------------|---------------|---------------|----------|-----------|--------|------|
| | | Anggaran | Realisasi | Rencana | Realisasi | Satuan | |
| 1. | Diklat auditor | 725.000.000,- | 720.860.000,- | 145 | 292 | Orang | - |
| 2. | PKS | 10.890.000,- | 9.176.000,- | 11 | 9 | keg | - |

**BAB III****HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT****A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI****1. Tahun 2024**

| No. | Nama | Kerugian Negara/Daerah (Rp) | Penyelesaian Kerugian Daerah (Rp) | Saldo (Rp) | Status |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------|
| 1. | LKPD Th. 2023 | 0 | 0 | 0 | Selesai |
| 2. | Efektifitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga&Sampah Sejenis RT TA 2023 s.d. Sem 1 2024 | 0 | 0 | 0 | Dalam Proses Tindak Lanjut PD |
| 3. | Kepatuhan atas Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan 2024 (s.d. 30 Sep) | 0 | 0 | 0 | Dalam Proses Tindak Lanjut PD |

2. Tahun 2023 dan pending Tahun sebelumnya

| No. | Nama | Kerugian Negara/Daerah (Rp) | Penyetoran (Rp) | Saldo (Rp) | Status |
|-----|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 1. | LKPD Th. 2005 | 144.024.461 | 75.000.000 | 69.024.461 | Belum Selesai |
| 2. | Belanja Daerah TA 2003 dan 2004 | 5.469.394.100 | 2.896.453.588 | 2.572.940.512 | Belum Selesai |

B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP

Hasil audit internal yang dilakukan di semester II tahun 2024 terdapat temuan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

Tabel 19
Jumlah Temuan dan Rekomendasi Kerugian
Semester II Tahun 2024

| NO | NAMA AUDIT | Perangkat Daerah / Unit Kerja | KERUGIAN (Rp) | JUMLAH SETORAN (Rp) | SISA ANGSURAN (Rp) | KET. |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|-------|
| I. | Audit Operasional/Kinerja | | | | | |
| 1 | Audit Kinerja | | | | | |
| | | DPMPTSP | 1.274.882 | 1.274.882 | 0 | Lunas |
| | | Dinas Pendidikan Pemuda dan | 30.823.000 | 30.823.000 | 0 | Lunas |



| NO | NAMA AUDIT | Perangkat Daerah / Unit Kerja | KERUGIAN (Rp) | JUMLAH SETORAN (Rp) | SISA ANGSURAN (Rp) | KET. |
|---------------|-------------------|---|-------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| | | Olahraga | | | | |
| | | Dinas Kesehatan | 870.000 | 870.000 | 0 | Lunas |
| | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2.250.000 | 2.250.000 | 0 | Lunas |
| | Sub Jumlah | | 35.217.882 | 35.217.882 | 0 | Lunas |
| 2 | Audit Operasional | | | | | |
| | | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 129.000 | 129.000 | 0 | Lunas |
| | | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | 3.457.356 | 3.457.356 | 0 | Lunas |
| | | Dinas Perdagangan | 282.000 | 282.000 | 0 | Lunas |
| | Sub Jumlah | | 3.868.356 | 3.868.356 | 0 | Lunas |
| II. | ADTT | | | | | |
| 1 | Tematik | NIHIL | - | - | - | - |
| 2 | Probity | NIHIL | - | - | - | - |
| 3 | Kasus/Investigasi | NIHIL | - | - | - | - |
| | Sub Jumlah | | 0 | 0 | 0 | Lunas |
| JUMLAH | | | 39.086.238 | 39.086.238 | 0 | Lunas |

C. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Lainnya

| NO | NAMA APIP LAINNYA | JENIS PENGAWASAN | KERUGIAN | JUMLAH SETORAN | SISA ANGSURAN | KET. |
|----|---------------------|------------------|----------|----------------|---------------|------|
| 1 | Inspektorat DIY | - | - | - | - | - |
| 2 | BPKP Perwakilan DIY | - | - | - | - | - |

**BAB IV****HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

Seluruh pengaduan masyarakat yang masuk melalui UPIK/JSS maupun surat aduan yang dikirim langsung ke Inspektorat telah ditindaklanjuti dengan kegiatan Penelitian dan Penelaahan Informasi. Sampai dengan semester II tahun 2024 ada 11 (sebelas) aduan dari masyarakat yang masuk ke Inspektorat dan ditindaklanjuti dengan 7 (tujuh) penelitian dan penelaahan informasi atas pengaduan dan ada 4 (empat) aduan masih dalam proses PPI dan 4 (empat) aduan disimpan (*file*) karena tidak berkadar pengawasan.

Tabel 20
Pengaduan Masyarakat Semester II Tahun 2024

| Uraian | Kasus | Tindak lanjut | | | Dalam Proses | Keterangan |
|------------------|-----------|---------------|----------|----------|--------------|--|
| | | File | PPI | ADTT | | |
| Melalui UPIK/JSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Aduan Langsung | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 Aduan selesai, di PPI : 2 dan dalam proses PPI 2; diberkaskan : 2. |
| Surat Aduan | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 Aduan selesai, di PPI : 1 dan dalam proses PPI : 2; diberkaskan : 2. |
| Disposisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Media Massa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jumlah | 11 | 4 | 7 | 0 | 4 | |

Catatan :

- File : pengaduan tidak berkadar pengawasan, maka diarsipkan.



BAB V

SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta antara lain:

1. Adanya upaya percepatan tindak lanjut yang dilakukan secara periodik dan terus menerus oleh Inspektorat Daerah terhadap Perangkat Daerah yang memiliki temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP;
2. Koordinasi intensif dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan kepada auditi, BPK RI maupun APIP lainnya;
3. Adanya dukungan PD yang proaktif dalam menindaklanjuti temuan Inspektorat Daerah dan pemeriksa lainnya;
4. Koordinasi yang berjalan baik antara Inspektorat Daerah dan PD mitra dan adanya timbal balik serta komunikasi yang berjalan dengan baik;
5. Koordinasi yang intens antara Pegawai di Inspektorat Daerah;
6. Adanya Klinik Konsultasi di Inspektorat Daerah memudahkan PD untuk berkonsultasi untuk meminimalisir kesalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sehingga dapat meminimalisir temuan dan rekomendasi.

B. Hambatan

Beberapa hambatan yang ditemui sampai dengan semester 2 tahun 2024 :

1. Adanya tambahan kegiatan-kegiatan baru yang muncul setelah penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan sifatnya menindaklanjuti amanat regulasi dari Pemerintahan di atasnya baik yang berasal dari kebijakan pusat ataupun kebijakan daerah, sehingga berpengaruh terhadap penyelesaian penugasan dan distribusi personel dalam penugasan.
2. Kurangnya kesiapan Perangkat Daerah dalam penyediaan kelengkapan dokumen pendukung pengawasan, karena Perangkat Daerah belum sepenuhnya memahami kewenangan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada instansi/perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern, sebagaimana tercantum pada Piagam Audit Intern.
3. Kendala sistem informasi dalam *update* data tindak lanjut pemeriksaan eksternal.
4. Terdapat beberapa hasil temuan pemeriksaan BPK yang sudah ditindaklanjuti, namun belum dianggap cukup oleh BPK walaupun sudah menindaklanjuti temuan BPK tersebut, karena penentuan suatu temuan selesai atau masih dalam proses adalah BPK Pusat. Sehingga hal ini dianggap menjadi tugas dan tanggungan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyelesaikan.



C. Rekomendasi

Untuk menciptakan efektifitas, efisiensi dan ekonomis dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta mencegah penyimpangan terhadap Peraturan Perundang-Undangan direkomendasikan adanya perbaikan Tatakelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern meliputi :

1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar menerapkan ketentuan tata kelola yang baik pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar :
 - a. menyusun penilaian risiko *fraud*/kecurangan pada pelaksanaan kegiatan maupun pengelolaan keuangan dan barang, serta menyusun pengendaliannya;
 - b. memantau pengendalian atas risiko kecurangan yang sudah diidentifikasi dan melaporkannya.
3. Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar :
 - a. memastikan penerapan sisdur keuangan, aset dan SHJ sesuai peraturan yang berlaku;
 - b. meningkatkan pengendalian terkait kode etik dan memberikan keteladanan dalam integritas.
4. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan agar melaksanakan reuiu dan memperbaiki pengaturan terhadap pengelolaan keuangan dan aset yang dapat menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.

**Rekap LHA Operasional TAHUN 2024
Semester I dan II**

| NO | No. LHP dan Tanggal | KODE BIDANG | T | R | TL | H | S | TL |
|----|---|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | AUDIT OPERASIONAL | | | | | | | |
| 1 | Laporan Hasil Audit Operasional Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 No X.700.1.2.1/11/AO/A/VIII/2024 Tanggal 14 Agustus 2024 | A | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Laporan Hasil Audit Operasional Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 - April 2024 No X.700.1.2.1/19/AO/B/VIII/2024 Tanggal 30 Agustus 2024 | B | 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Laporan Hasil Audit Operasional Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta No X.700.1.2.1/16/AO/C/VIII/2024 Tanggal 16 Agustus 2024 | C | 13 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Laporan Audit Operasional pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta No X.700.1.2.1/14/AO/D/VIII/2024 Tanggal 15 Agustus 20224 | D | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | JUMLAH | | 27 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

T : Temuan

R : Rekomendasi

H : Hal-hal

S : Saran

TL : Tindak Lanjut



Rekap LHA Kinerja TAHUN 2024
Semester I dan II

| NO | No. LHP dan Tanggal | KODE BIDANG | T | R | TL | H | S | TL |
|----|---|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | AUDIT KINERJA | | | | | | | |
| 1 | Laporan Hasil Audit Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 No X.700.1.2.1/10/AK/A/VIII/2024 Tanggal 14 Agustus 2024 | A | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Laporan Hasil Audit Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 No X.700.1.2.1/09/AK/B/VIII/2024 Tanggal 12 Agustus 2024 | B | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Laporan Hasil Audit Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta No X.700.1.2.1/15/AK/C/VIII/2024 Tanggal 15 Agustus 2024 | C | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Laporan Hasil Audit Kinerja Dinas Kesehatan kota Yogyakarta No X.700.1.2.1/13/KIN/D/VIII/2024 Tanggal 19 Agustus 2024 | D | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | JUMLAH | | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

- T : Temuan
- R : Rekomendasi
- H : Hal-hal
- S : Saran
- TL : Tindak Lanjut



**Rekap LHA ADTT TAHUN 2024
SEMESTER I & II**

| NO | No. LHP dan Tanggal | KODE BIDANG | Keterangan | | | | | | Ket. |
|----------|--|-------------|------------|----|----|---|---|----|------|
| | | | T | R | TL | H | S | TL | |
| A | ADTT Tematik | | | | | | | | |
| 1 | Laporan Hasil Audit atas Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Data Center Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian No. X.700.1.2.4/05/ADTT/C/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024 | C | 27 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga X.700.1.2.1/26/ADTT/C/XII/2024 Tanggal : 31 Desember 2024 | C | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | Laporan Hasil audit Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Hibah Pemerintah kota Yogyakarta Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : X.700.1.21.27/ADTT/D/XII/2024 Tanggal : 31 Desember 2024 | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| B | ADTT PROBITY | | | | | | | | |
| 1 | Laporan Hasil Probity Audit Pekerjaan Pembangunan SMPN 10 Yogyakarta pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman No. X.700.1.2.1/20/ADTT/A/IX/2024 Tanggal 30 September 2024 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 2 | Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Probity Audit Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) Tahun Anggaran 2024 No. X.700.1.2.1/21/ADTT/B/X/2024 Tanggal 14 Oktober 2024 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| NO | No. LHP dan Tanggal | KODE BIDANG | Keterangan | | | | | | Ket. |
|----------|--|-------------|------------|---|----|---|---|----|---|
| | | | T | R | TL | H | S | TL | |
| C | ADTT INVESTIGASI | | | | | | | | |
| 1 | Laporan Hasil ADTT Dugaaan Pelanggaran terhadap PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai pada Pengelolaan Pajak di Kemantren Umbulharjo Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 Kemantren Umbulharjo Nomor : X.700.1.2.1/08/ADTT/C/VII/2024 Tanggal : 8 Juli 2024 | D | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Hukuman Disiplin dan Pengembalian ke Kas Daerah |
| 2 | Laporan Hasil ADTT Investigatif Dugaan Penyimpangan Penggantian Material Penutup Jalan pada Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Jalan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : X.700.1.2.1/12/ADTT/VIII/2024 Tanggal : 15 Agustus 2024 | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Catatan : Temuan dalam bentuk Permasalahan |
| D | PDTT | | | | | | | | |
| 1 | Laporan Hasil Evaluasi Perumda BPR Bank Jogja Bank Jogja Nomor : 700.1.2.1/138/E.BJ/B/VI/2024 Tanggal : 03 Juni 2024 | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Catatan : Temuan dalam bentuk Permasalahan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam bentuk Evaluasi dan bukan merupakan audit (Pengawasan dengan Tujuan Tertentu) sehingga tidak terdapat kode temuan, kode rekomendasi dan pemantauan Tindak Lanjut atas saran yang diberikan |

| NO | No. LHP dan Tanggal | KODE BIDANG | Keterangan | | | | | | Ket. |
|---------------|--|-------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---|
| | | | T | R | TL | H | S | TL | |
| 2 | Laporan Hasil Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 700.1.2.1/172/E.OPAD/B/VII/2024 Tanggal : 31 Juli 2024 | B | 6 | 0 | 0 | 0 | | 4 | Catatan : Temuan dalam bentuk Permasalahan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam bentuk Evaluasi dan bukan merupakan audit (Pengawasan dengan Tujuan Tertentu) sehingga tidak terdapat kode temuan, kode rekomendasi dan pemantauan Tindak Lanjut atas saran yang diberikan |
| 3 | Laporan Hasil Reviu atas Proses Reviu Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Perluasan Gedung Fasilitas dan Pengadaan Perabot Layanan Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor : 700.1.2.1/240/R.HPS/C/XII/2024 Tanggal : 19 Desember 2024 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Catatan : Tidak ada rekomendasi atau saran yang perlu ditindaklanjuti |
| JUMLAH | | | 63 | 30 | 29 | 5 | 21 | 13 | |

Keterangan :
T : Temuan
R : Rekomendasi
H : Hal-hal
S : Saran
TL : Tindak Lanjut

Yogyakarta, 11 Maret 2025
Inspektur

PITRI PAULINA ANDRIANI, ST
NIP. 19700327 199503 2 002

**REKAP JUMLAH KERUGIAN
SEMESTER I & II
TAHUN 2024**

| NO | BULAN | KODE TEMUAN | RUPIAH (Rp) | KETERANGAN |
|---------------|-----------|-------------|------------------------|-------------------|
| 1 | JANUARI | | NIHIL | |
| 2 | FEBRUARI | | NIHIL | |
| 3 | MARET | | NIHIL | |
| 4 | APRIL | | NIHIL | |
| 5 | MEI | | NIHIL | |
| 6 | JUNI | | NIHIL | |
| 7 | JULI | | NIHIL | |
| 8 | AGUSTUS | 1.01.04 | Rp1.274.882,00 | Audit Kinerja |
| | | 1.04.01 | Rp30.823.000,00 | Audit Kinerja |
| | | 1.01.07 | Rp129.000,00 | Audit Operasional |
| | | 1.03.7 | Rp870.000,00 | Audit Kinerja |
| | | 3.01.03 | Rp2.250.000,00 | Audit Kinerja |
| | | 1.01.04 | Rp3.457.356,00 | Audit Operasional |
| | | 1.01.09 | Rp282.000,00 | Audit Operasional |
| 9 | SEPTEMBER | | | |
| 10 | OKTOBER | | NIHIL | |
| 11 | NOVEMBER | | NIHIL | |
| 12 | DESEMBER | 07 | Rp4.250.000 | ADTT |
| JUMLAH | | | Rp43.336.238,00 | |

Yogyakarta, 11 Maret 2025

Inspektur



FITRI PAULINA ANDRIANI, ST
 NIP. 19700327 199503 2 002

| No. | AUDITI | JUMLAH TEMUAN | Kode Temuan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 1.01.01 | 1.01.03 | 1.01.04 | 1.01.07 | 1.01.09 | 1.03.05 | 1.03.07 | 1.04.00 | 1.04.01 | 1.04.03 | 1.04.06 | 1.04.07 | 1.04.10 | 2.01.01 | 2.01.02 | 2.02.01 | 2.02.07 | 2.03.1 | 2.03.02 | 2.03.05 | 3.01.03 | 3.03.01 | |
| ADTT Tematik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Laporan Hasil Audit atas Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Data Center Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian No. X.700.1.2.4/05/ADTT/C/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 3 | - | - | - | |
| 2 | Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga X.700.1.2.1/26/ADTT/C/XII/2024 Tanggal : 31 Desember 2024 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JUMLAH | | | 65 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 24 | 5 | 2 | 1 | 2 |

Yogyakarta, 11 Maret 2025
Inspektur

FITRI PAULINA ANDRIANI, ST
NIP. 19700327 199503 2 002



**REKAPITULASI KODE REKOMENDASI HASIL AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU
SEMESTER I & II TAHUN 2024**

| No. | AUDITI | JUMLAH REKOMENDASI | Kode Rekomendasi | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| OPERASIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Laporan Hasil Audit Operasional Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 No X.700.1.2.1/11/AO/A/VIII/2024 Tanggal 14 Agustus 2024 | 12 | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 |
| 2 | Laporan Hasil Audit Operasional Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 - April 2024 No X.700.1.2.1/19/AO/B/VIII/2024 Tanggal 30 Agustus 2024 | 17 | 1 | - | - | - | 1 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 3 | Laporan Hasil Audit Operasional Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta No X.700.1.2.1/16/AO/C/VIII/2024 Tanggal 16 Agustus 2024 | 30 | 1 | - | - | - | 4 | 7 | - | 1 | 12 | - | 2 | - | 2 | 1 |
| 4 | Laporan Audit Operasional pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta No X.700.1.2.1/14/AO/D/VIII/2024 Tanggal 15 Agustus 2024 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| KINERJA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Laporan Hasil Audit Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 No X.700.1.2.1/10/AK/A/VIII/2024 Tanggal 14 Agustus 2024 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 2 | Laporan Hasil Audit Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 No X.700.1.2.1/09/AK/B/VIII/2024 Tanggal 12 Agustus 2024 | 9 | 1 | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Laporan Hasil Audit Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta No X.700.1.2.1/15/AK/C/VIII/2024 Tanggal 15 Agustus 2024 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |

| No. | AUDITI | JUMLAH REKOMENDASI | Kode Rekomendasi | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 4 | Laporan Hasil Audit Kinerja Dinas Kesehatan kota Yogyakarta No X.700.1.2.1/13/KIN/D/VIII/2024 Tanggal 19 Agustus 2024 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| ADTT Tematik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Laporan Hasil Audit atas Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Data Center Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian No. X.700.1.2.4/05/ADTT/C/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024 | 27 | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | - | 11 | - | - | - | 2 | - |
| 2 | Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga X.700.1.2.1/26/ADTT/C/XII/2024 Tanggal : 31 Desember 2024 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| JUMLAH | | 99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 2 | 4 | 18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |

Yogyakarta, 11 Maret 2025

Inspektur


FITRI PAULINA ANDRIANI, ST
NIP. 19700327 199503 2 002

